

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Peneliti memberikan sebuah kesimpulan dari hasil penelitian terhadap pelanggaran-pelanggaran Pilkada Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2020. Pilkada Kabupaten Tasikmalaya seharusnya dilaksanakan pada tanggal 23 September, namun diundur menjadi 9 Desember tahun 2020. Penetapan tanggal dan waktu Pilkada berubah karena mengkondisikan dengan merebaknya wabah Covid-19 di dunia, termasuk di Indonesia dan khususnya di Kabupaten Tasikmalaya. Peserta Pilkada Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020 diikuti oleh 4 (empat) pasangan calon dan salah satunya berasal dari pasangan calon perseorangan yaitu tanpa dukungan partai politik. Namun, Pilkada Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020 belum mampu terhindar dari sejumlah pelanggaran, salah satu yang menjadi sorotan adalah sengketa PHPU.

Permohonan pemohon kepada termohon atas sengketa PHPU tidak dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, karena tidak berkedudukan hukum dan tidak memiliki alasan kuat serta bukti yang tidak cukup kuat untuk membuktikan permohonan pemohon. Oleh karena itu, tidak adanya perubahan signifikan yang mempengaruhi putusan KPU Kabupaten Tasikmalaya mengenai putusan kemenangan Paslon nomor urut 02 (dua) yaitu pasangan Ade-Cecep sebagai Bupati dan Wakil Bupati. Pelanggaran lainnya seperti dugaan *money politics*,

maladministrasi, Netralitas ASN dan Pelanggaran kode etik lembaga penyelenggara, sebagian laporan tersebut terbukti bersalah.

Pelanggaran Netralitas ASN menjerat Camat Jatiwaras, Kepala Satpol PP dan Kepala Desa Sukagalih. Laporan pelanggaran tersebut terbukti bersalah pada persidangan di Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Hasil persidangan menyatakan mereka terbukti bersalah dan tiga pelaku tersebut mendapatkan hukuman membayar denda dan jika tidak bisa membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan penjara.

Dugaan pelanggaran kode etik melibatkan KPU dan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya dinyatakan sebagian terbukti bersalah dalam persidangan yang dilakukan oleh DKPP RI. Terbukti tidak berkepastian hukum dan juga tidak profesional dalam melaksanakan tugasnya menangani laporan-laporan yang diterima oleh anggota Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya. KPU Kabupaten Tasikmalaya meskipun tidak terbukti melanggar, namun mereka ikut andil menyumbangkan inkonsistensi kinerja dari pasal 18 Peraturan KPU nomor 15 tahun 2013 dan hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya dalam isi laporan putusan PHPU Mahkamah Konstitusi untuk Pilkada Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020. Menyebabkan terjadinya ketidaksinambungan antara Bawaslu dan KPU Kabupaten Tasikmalaya dalam menyelesaikan kasus pelanggaran yang diterima, dan menciptakan keambiguan.

Faktor umum dari sejumlah pelanggaran Pilkada Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020 adalah murni karena keinginan setiap pihak-pihak dalam mewujudkan

kepentingan politiknya, meskipun menempuh jalan yang bertentangan dengan hukum. Pelanggaran tersebut tetap bersalah karena menempuh jalan melawan hukum dan cenderung mengotori integritas Pilkada di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020, namun untuk hasil akhir suara tidak mengalami perubahan dan sah ditetapkan untuk Pilkada Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020. Untuk faktor khusus pendorong terjadinya pelanggaran-pelanggaran Pilkada Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020, peneliti tidak menemukan faktor tersebut. Jenis atau pola pelanggaran-pelanggaran Pilkada Kabupaten Tasikmalaya merupakan pola umum yang dapat ditemukan dalam pelanggaran Pilkada-Pilkada lainnya. Keunikan terjadi sepanjang periode Pilkada Kabupaten Tasikmalaya adalah tidak ditemukannya letupan pistol atas kerusuhan masyarakat dalam bentuk penolakan pada hasil Pilkada, tidak menimbulkan kerusuhan yang merugikan banyak pihak.

4.2 Saran

A. Saran bagi Lembaga Penyelenggara Pemilu

Berikut merupakan saran-saran yang dapat diberikan peneliti terhadap Lembaga Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Tasikmalaya:

1. Diharapkan kedepannya bagi penyelenggara Pilkada Kabupaten Tasikmalaya agar lebih memerhatikan setiap detail tugas yang diberikan. Nilai efisien pada waktu Pilkada tahun 2020 menjadi berkurang nilainya. Pemahaman yang sama dalam menyelesaikan kasus antara Bawaslu dan KPU dapat membantu menjaga pemanfaatan waktu dengan baik. Meskipun adanya peraturan mengikat yang berbeda, namun perlu adanya jembatan yang menghubungkan

perbedaan tersebut menjadi satu putusan yang sama. Sehingga tidak menimbulkan dua putusan yang berbeda dan menimbulkan kecurigaan.

2. Meningkatkan sinergisitas antara masing-masing lembaga penyelenggara Pemilu.
3. Meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab, tugas, wewenang dan kewajiban masing-masing peran lembaga penyelenggara Pemilu. Agar menghindari pengulangan tidak profesional saat menangani laporan-laporan yang diterima.

B. Saran bagi Akademis

Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat berguna bagi mahasiswa yang melakukan penelitian topik serupa. Peneliti juga mengharapkan hasil penelitian ini dapat melengkapi dan menambah studi-studi kasus di Program Studi Ilmu Pemerintahan, sehingga bisa memberikan penambahan wawasan bagi para pembacanya dan pembaca tidak terbatas dalam mencari referensi dengan jenis topik penelitian yang serupa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Aditya Perdana, B. M. (2019). *Tata Kelola Pemilu Indonesia*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Penelitian View Project Seri Buku Ajar View Project* . Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group.
- W.Creswell, J. (2009). *Third Edition Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. United States of America: SAGE Publications, Inc.
- Pamungkas, S. (2009). *Perihal Pemilu*. Yogyakarta: Fisipol UGM.
- Perdana, A., Tanthowi, P. U., Sukmajati, M., & Indonesia. Komisi Pemilihan Umum. (n.d.). *Tata kelola pemilu di Indonesia*.
- RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026
- Widodo, H. (2015). *Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada Serentak DI Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal:

- Amalia, P. C. (2017). Model Penyelesaian Sengketa Alternatif Dalam Sengketa Administrasi Pemilihan Umum Di Provinsi Jawa Timur Daerah Istimewa Yogyakarta. 1-17.
- Fania Aisyah Puteri, N. H. (2023). Malapraktik Oleh Penyelenggara Pemilu: Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018 dalam Perspektif Tata Kelola Pemerintahan. 1-24.
- Botifar, M., Damayanti, P., & Thadi, R. (2021). Dampak Pembatasan Kampanye Bagi Pasangan Calon pada Pilkada Serentak 2020. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 4(2), 100–113.
- Chaniago, P. S. (2016). Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015. 196-211.
- Grömping, M. (2018). The Integrity of Elections in Asia: Policy Lessons from Expert Evaluations. *Asian Politics & Policy*, 10(3), 527–547.
- Haggard, S., & Kaufman, R. R. (2016). Democratization during the Third Wave. In *Annual Review of Political Science* (Vol. 19, pp. 125–144).
- Hernadi Affandi, N. K. (2020). Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 di Era Pandemi Covid-19: Studi Kasus di Provinsi Jawa Barat. 51-68. (Prabowo, 2017)

- Ibnu Artadil, S. (2020). Rekontruksi Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Sengketa Pilkada (Studi Kasus Sengketa Pilwalkot Cirebon). 60-72.
- Ismail. (2023). PERAN BAWASLU SEBAGAI PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMILIHAN UMUM. In *Universitas Dharmawangsa* (Vol. 331).
- Khaq, M. Zimamul Khaq. (2023). Kritik Teori Keadilan John Rawls Terhadap UU No.7 Tahun 2017 Pasal 420 (b) Tentang Pemilu 2019. *Indonesian Journal of Political Studies*, (Vol 3. 26-45).
- Limbong, J. H. (2021). Penindakan Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif pada Pilkada 2020, Menimbulkan Norma Baru (Studi Kasus: Pemilihan Wali Kota Bandar Lampung 2020). 36-51.
- Lisa Mediana, L. Z. (2023). Upaya Preventif Bawaslu Kabupaten Sumba Dalam Menangani Pelanggaran Pilkada Tahun 2020 (Studi Kasus Bawaslu Kabupaten Sumbawa). *Jurnal Hukum Perjuangan*, 36-6.
- M.Pem.I, W. W. (2020). Kebijakan Penyelenggaraan Pilkada (Menghadapi Pilkada 2020 Ditengah Covid 19 dan New Normal). 31-44.
- M.Si, D. O. (2021). Penguatan Demokrasi Dari Pemilukada: Evaluasi Penyelenggaraan Pemilukada Serentak Tahun 2015, 2017 dan 2018. 88-141.
- Mahpudin. (2020). Konflik Pemilu: Dinamika Sengketa Calon Perseorangan dalam Kontestasi Elektoral di Kabupaten Lebak. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 99-117.
- Ma'arif, W. M., Sakir, S., & Abhipraya, F. A. (2022). Peran Bawaslu dalam Pengawasan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 8(1).
- Mia Murti Rahayu, I. &. (2020). Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah. *Diponegoro Law Journal*, 373-383.
- Nur'aini, R. D. (2020). Penerapan Metode Studi Kasus Yin dalam Penelitian Arsitektir dan Perilaku. 92-104.
- Prabowo, G. W. (2017). Integritas Pemilu: Proses Verifikasi Peserta Pemilu Di KPUD Pada Pemilu Legislatif 2014. *Jurnal Politik Indonesia*, 45-56.
- Putu Ari Astawa, O. I. (2017). DEMOKRASI INDONESIA.
- Rahmatunnisa, M. (2017). MENGAPA INTEGRITAS PEMILU PENTING? (Vol. 3, Issue 1).

- Reininda, V. (2021). Evaluasi Penanganan Sengketa Hasil Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 24-47.
- Riwanto, Agus. (2020). Model Pengintegrasian Penegakan Hukum Pilkada Serentak Guna Mewujudkan Keadilan Substantif (Evaluasi Penegakan Hukum Pilkada Serentak 2015-2020). *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 61-81.
- Sardini, Nur Hidayat. (2015). Studi Perbandingan Integritas Penyelenggara Pemilu Dalam Pelaksanaan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Maluku Tahun 2013. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*. 55-88.
- Sarofah, R. (2023). Pengaruh Pendidikan Politik Gen Z Dan Millenial Terhadap Upaya Mewujudkan Pemilu Serentak Tahun 2024 yang Berintegritas. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 9(1).
- Setiawan, H. B., & Hertanto, D. (2023). Malpraktek Pemilu Pada Pelaksanaan Pilkada Serentak Saat Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. *Jurnal Journal Of Government and Social Issues (JGSI)*, 1(2), 2022.
- Tatawu, G. (2017). Hakekat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). 144-165.
- Tauda, G. A. (2022). Problematika Pengaturan "Kerugian Langsung" Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan (Studi Kasus Pilkada Halmahera Utara 2020). *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 367-377.
- Ujang Abidin, D. (2022). Dua Sisi Proses Penyelesaian Sengketa: Upaya Mewujudkan Keadilan Pemilu. 239-263.
- Wibowo, M. E. (2023). Integritas Penyelenggara Pemilu Ad-Hoc: Malpraktik Distribusi Formulir C-6 di Pilkada Tangerang Selatan Tahun 2020. *Journal of Political Issues*, 62-73.
- Widodo, B. E. (2016). Penyelesaian Sengketa Pilkada Serentak 2015 Dalam Perspektif Electoral Justice System. *Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 9-23.
- Hilmi, Zaki. (2020). Evaluasi Pengawasan Pilkada 2020 Pada Masa Pandemi Covid- 19 : Studi Empiris Pada 8 (delapan) Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Keadilan Pemilu*. 89 – 106.

Putusan Hukum:

Undang-Undang Dasar No.10 Tahun 2016

Putusan DKPP Nomor: 144-PKE-DKPP / VI / 2021

Putusan DKPP Nomor: 62 – PKE – DKPP / II /2021

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021

Putusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 1181/ PL.02.6-Kpt / 3206 / KPU-Kab / XXI / 2020

Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020

Undang-Undang No.5 Pasal 2 Tahun 2014

Undang-Undang No.1 Tahun 2015

Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2014

Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013

Skripsi :

Puteri, Fania Aisyah. (2023). *Malapraktik Oleh Penyelenggara Pemilu: Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018 Dalam Perspektif Tata Kelola Pemerintahan* (Skripsi Sarjana, Universitas Diponegoro).

Munir, Misbachul. (2019). *Pemilu Dan Masyarakat Samin (Studi Kasus Di Dusun Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati)* (Skripsi Sarjana, Universitas Diponegoro).

Trisha Anggaraeni, Intan. (2022). *Analisis Strategi Pemenangan Caleg Kevin Mahesa Sebagai Anggota Dewan Termuda Dalam Pemilihan Legislatif Kota Magelang Periode 2019-2024* (Skripsi Sarjana, Universitas Diponegoro).

Tesis :

Febriyani Hilda Dinati, J., Hilda Dinati Departemen Politik, F. (2018) *MALPRAKTIK PEMILU PADA PILEG 2014 DI KABUPATEN BADUNG Studi Kasus Tentang Mobilisasi Pemilih Pengguna KTP.* (Tesis Magister, Universitas Airlangga).

Hayatullah, H. (2022). *Malapraktik dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 (Studi Tentang Kemelut Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu untuk PDI Perjuangan Dapil Kalimantan Barat 1).* (Tesis Magister, Universitas Diponegoro).

Dokumen :

Data Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

Laporan KPU Kabupaten Tasikmalaya Akhir Tahapan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020.

Data Penanganan Pelanggaran Pilkada Tahun 2020 yang Di Register Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya.

RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026

Internet :

Diduga Tidak Profesional, DKPP Periksa Empat Anggota Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya. (2021). Dalam <https://dkpp.go.id/diduga-tidak-profesional-dkpp-periksa-empat-anggota-bawaslu-kabupaten-tasikmalaya/>. Diunduh pada 19 Agustus 2024.

Dihni, Vika Azhiya. (2021). Bawaslu Tangani 1.532 Kasus Dugaan Pelanggaran Pilkada Serentak 2020. Dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/11/bawaslu-tangani-1532-kasus-dugaan-pelanggaran-pilkada-serentak-2020>. Diunduh pada 13 Agustus 2023.

Paparkan Data Aduan Dan Perkara Selama 2020. (2020). Dalam <https://dkpp.go.id/dkpp-paparkan-data-aduan-dan-perkara-selama-2020/>. Diunduh pada 13 Agustus 2023.

Fachrudin, Fachrudin and Meiliana, Diamanty. (2018). KPU: Ada 56 Sengketa Pilkada yang Diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Dalam <https://nasional.kompas.com/read/2018/07/12/07030091/kpu--ada-56-sengketa-pilkada-yang-diajukan-ke-mahkamah-konstitusi>. Diunduh pada 18 Oktober 2023.

Fitrian, Aris Mohamad. (2020). Daftar Pemilih Tetap Pilkada Tasikmalaya 2020 Berubah, Jumlahnya Turun 33.487. Dalam <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01832388/daftar-pemilih-tetap-pilkada-tasikmalaya-2020-berubah-jumlahnya-turun-33487>. Di unduh pada 7 April 2024.

ASN Harus Netral di Pemilu 2024. (2023). Dalam <https://indonesiabaik.id/infografis/asn-harus-netral-di-pemilu-2024-1>. Diunduh pada 9 April 2024.

Fakta dan Data Sengketa Pilkada Serentak 2017. (2017). Dalam <https://video.medcom.id/metro-news/JKRRqLwK-fakta-dan-data-sengketa-pilkada-serentak-2017>, Diunduh pada 11 Juni 2024.

Hermawan, Mimi Kartika. (2021). MK tak Terima Gugatan Sengketa Pilkada Tasikmalaya. Dalam <https://news.republika.co.id/berita/qq7ssc354/mk-tak-terima-gugatan-sengketa-pilkada-tasikmalaya>. Diunduh pada 19 Agustus 2024.

Ika, Irwan Nugraha. (2020). Demo Tolak Pilkada Tasikmalaya Ricuh Lagi, Polisi dan Pedemo Luka-Luka.... Dalam <https://regional.kompas.com/read/2020/12/16/15573741/demo-tolak-pilkada-tasikmalaya-ricuh-lagi-polisi-dan-pedemo-luka-luka?page=all>. Diunduh pada 19 Agustus 2024.

- Informasi Detail Perkara.* (2021). Dalam https://sipp.pn-tasikmalaya.go.id/index.php/detil_perkara. Diunduh pada 07 Juni 2024.
- Puspita, Bayu Adji P. (2020). Bawaslu Tasikmalaya Proses 13 Pelanggaran Pilkada. Dalam <https://republika.co.id/berita/qlbkdq428/bawaslu-tasikmalaya-proses-13-pelanggaran-pilkada>. Diunduh pada 19 Agustus 2024.
- PN Tasikmalaya Vonis Dua ASN Pelanggar Pilkada.* (2021). Dalam <https://mediaindonesia.com/nusantara/378153/pn-tasikmalaya-vonis-dua-asn-pelanggar-pilkada>. Diunduh pada 15 Juni 2024.
- Purnawan, Hendi. (2020). Pelanggaran Netralitas ASN Pilkada 2020, Bawaslu Kirim 369 Laporan Kepada KASN. Dalam <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/pelanggaran-netralitas-asn-pilkada-2020-bawaslu-kirim-369-laporan-kepada-kasn>. Diunduh 10 Juli 2024.
- Rahadian, Deden. (2020). Paslon Iip-Iwan Gugat Hasil Pilkada Tasikmalaya 2020 ke MK. Dalam <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5311815/paslon-iip-iwan-gugat-hasil-pilkada-tasikmalaya-2020-ke-mk>. Diunduh pada 19 Agustus 2024.
- Visi Misi. Kabupaten Tasikmalaya.* (2022). Dalam <https://portal.tasikmalayakab.go.id/visi-misi/>. Diunduh pada 14 Juli 2024.
- Zulkarnaen, Azis. (2021). Bupati Tasikmalaya dan Bandung, Dilantik. Dalam <https://rri.co.id/bandung/politik/pilkada-jabar-2020/1034117/bupati-tasikmalaya-dan-bandung-dilantik?>. Diunduh pada 12 Juli 2024.
- Zainal, Ali. (2020). Jumlah TPS Pilkada Kab. Tasik 2020 Dipastikan Bertambah. Dalam <https://kilasradiopriangan.com/2020/06/18/jumlah-tps-pilkada-kab-tasik-dipastikan-bertambah/>. Diunduh 5 Juli 2024.